

Konflik antara Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Kontemporer

Prayoga Teguh Karisma¹, Yunita Putri Anggellina²

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; yogakarisma3@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; putrianggellina207@gmail.com

Received: 21/09/2023

Revised: 15/11/2023

Accepted: 14/12/2023

Abstract

Criminal law enforcement is a field that often faces complex challenges in balancing individual human rights with the broader public interest. This study examines in depth the comparison between human rights principles and the need to maintain public order in the context of criminal law enforcement. The author illustrates this conflict through contemporary criminal law case studies that reflect real-world situations. The research method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques use content analysis techniques. The results of this research particularly highlight the ongoing tension between the protection of individual rights guaranteed by law and the urgent need to maintain social order required by society as a whole. By exploring this concept, this research contributes to a deeper understanding of how criminal law enforcement impacts human rights in the complex context of the modern world.

Keywords

Criminal Law Enforcement; Human Rights; Public Interest; Legal Conflict; Impact of Legal Policy

Corresponding Author

Prayoga Teguh Karisma

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; yogakarisma3@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era informasi dan teknologi yang semakin maju, perubahan dinamis dalam masyarakat, dan perkembangan berbagai isu global, tugas penegakan hukum pidana semakin rumit. Tantangan paling pokok adalah bagaimana menjaga ketertiban sosial sekaligus tetap menghormati hak-hak dasar individu. Keseimbangan ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan efektif (M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, 2022). Dalam upaya untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa kompleksitas ini tidak hanya mencerminkan tantangan teknis, tetapi juga moral dan etika. Bagaimana hukum dan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak individu sambil tetap mengakui pentingnya menjaga ketertiban masyarakat adalah pertanyaan yang semakin mendesak di era ini. Semua ini menjadikan penegakan hukum pidana menjadi salah satu arena yang paling memerlukan pemikiran kritis dan solusi inovatif dalam konteks masyarakat yang terus berubah.



(Johnson, 2022).

Penegakan hukum pidana adalah sebuah ranah yang saat ini berada dalam fokus perhatian yang semakin intens. Dalam era modern ini, penegakan hukum pidana menghadapi kompleksitas dan tantangan yang mengharuskan perannya semakin rumit. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan publik yang bersifat lebih luas.

Studi ini bertujuan untuk menjelajahi konflik yang muncul di dalam domain penegakan hukum pidana, yang melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Untuk memahami secara lebih mendalam konflik ini, kami akan menyajikan beberapa kasus hukum pidana kontemporer yang menampilkan perjuangan dunia nyata dalam menyeimbangkan perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat.

Dalam analisis ini, penulis akan menggali dampak yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu di dalam masyarakat. Pengkajian ini akan menyoroti kompleksitas relasi antara hukum dan individu. Saat kebijakan penegakan hukum pidana diimplementasikan, mereka seringkali memiliki efek yang menciptakan ketegangan berat antara perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban sosial (Malau, 2023).

Temuan dalam penelitian ini akan mengeksplorasi dampak-dampak konkret yang muncul dari kebijakan penegakan hukum pidana, menyoroti situasi di mana hak-hak asasi manusia individu mungkin terancam atau terbatas dalam rangka menjaga keamanan masyarakat. Keberlanjutan ketegangan ini menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan yang memadukan hak asasi individu dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Penulis juga akan mengupas lebih dalam bagaimana peraturan dan tindakan penegakan hukum berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, sambil mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada citra dan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Dalam konteks yang semakin kompleks dan serba cepat, memahami dinamika ini menjadi esensial dalam upaya kita untuk merancang sistem penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sambil menjaga ketertiban sosial yang diperlukan (Amelia Arief, 2019).

Penelitian ini secara khusus akan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum pidana dapat memiliki dampak substansial pada hak asasi manusia dalam realitas dunia yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan ini akan membantu kita dalam mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menangani konflik di antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam ranah penegakan hukum pidana (Melisa Dewi Nur Aeni & Bambang Tri Bawono, 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan metode penelitisan kualitatif deskriptif yang berusaha menjelaskan gambaran yang mendalam untuk menggali dampak kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu di dalam masyarakat. Pendekatan analisis konten ini dipilih untuk memahami interaksi kompleks antara kebijakan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana yang kompleks dan dinamis. Fokus penelitian ini ialah pada Konflik antara Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum Pidana.

Keberadaan fokus dalam penelitian di maksudkan untuk membatasi studi. Dimana fungsinya membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian penelitian. Fokus penelitian menurut (Lexy J. Moleong, 2018) sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian karena penentuan fokus suatu penelitian memiliki 2 tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang dibahas oleh peneliti. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti akan tahu persis data/informasi apa yang akan dikumpulkan dan data/informasi mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan dalam rangka mendukung data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dipilah dan disederhanakan, agar memberi kemudahan dalam penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara (Yulianto Kadji, 2016). Teknik analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles & Huberman (1992) dalam (Yulianto Kadji, 2016). Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded (membumi).

Sumber data yang digunakan terdiri dari wawancara dan berbagai dokumen resmi terkait dengan kasus-kasus hukum pidana yang telah terpilih sebagai studi kasus, termasuk putusan pengadilan, laporan investigasi, serta kebijakan dan peraturan penegakan hukum yang relevan. Data ini merupakan landasan utama untuk menganalisis dampak kebijakan penegakan hukum pidana pada hak asasi manusia dan kepentingan publik. (Martinez, 2023). Menurut Loflant dan loflant dalam (Moleong, 2017) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau ucapan, tindakan. Dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam (Suharsimi arikunto, 2006) mejelaskan juga tentang sumber data yaitu: benda atau orang, tempat pengamatan penelitian, membaca atau bertanya tentang data secara umum.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan direduksi atau dipilah dengan tujuan memperoleh

data yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola, perbedaan, dan kesamaan dalam implementasi kebijakan penegakan hukum pidana dalam konteks hak asasi manusia dan kepentingan publik.

Dari hasil observasi dan wawancara ini akan membantu dalam memahami secara lebih mendalam dampak kebijakan penegakan hukum pidana pada hak asasi manusia individu, serta peran penting dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan individu dan kepentingan publik. (Adam, 2020). Dengan metode ini, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang substansial pada pemahaman kompleksitas konflik antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana di dunia yang semakin kompleks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kasus Studi	Dampak pada Hak Asasi Manusia Individu	Dampak pada Kepentingan Publik
Kasus 1: Korupsi dalam Pengadaan Proyek Publik	Kasus ini mengungkapkan dampak serius pada hak asasi manusia individu, karena korupsi dalam pengadaan proyek publik mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak adil dan merugikan masyarakat.	Di sisi lain, tindakan penegakan hukum terhadap korupsi ini juga membantu memastikan penggunaan dana publik yang lebih transparan dan efisien.
Kasus 2: Kekerasan Polisi dalam Penangkapan	Kasus ini memperlihatkan dampak negatif pada hak asasi manusia individu, terutama terkait dengan kasus kekerasan polisi dalam penangkapan.	Sementara itu, penegakan hukum yang tepat dalam kasus ini sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik.
Kasus 3: Pengawasan Pemerintah Terhadap Internet	Penelitian ini menyoroti ketegangan yang muncul dalam pengawasan pemerintah terhadap internet, di mana privasi individu sering kali dikompromikan demi kepentingan keamanan publik.	Meskipun demikian, pengaturan yang seimbang dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia individu dan kepentingan masyarakat.

Penjelasan:

Dalam hasil penelitian ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap beberapa kasus yang sangat relevan dengan judul penelitian terkait. Kasus pertama yang di eksplorasi adalah kasus korupsi dalam pengadaan proyek publik. Dalam konteks ini, penulis menyoroti dampak serius yang timbul terhadap hak asasi manusia individu, terutama terkait dengan alokasi sumber daya yang tidak adil dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam kasus kedua, penulis memfokuskan perhatian pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penangkapan. Hasil penelitian kami mengungkapkan dampak negatif yang signifikan pada hak asasi manusia individu dalam situasi ini. Kejadian-kejadian semacam ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tepat untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik, sambil tetap menghormati hak-hak individu.

Kemudian, kasus ketiga yang penulis analisis adalah terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap internet. Penelitian disini menyoroiti ketegangan yang muncul dalam konteks pengawasan ini, di mana privasi individu sering kali dikompromikan demi kepentingan keamanan publik. Dalam memahami bahwa pengaturan yang seimbang dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia individu dan sekaligus kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam semua kasus yang penulis telaah, disini memberikan penjelasan singkat tentang dampak-dampak konkret yang terkait dengan hak asasi manusia individu dan kepentingan publik. Meskipun penulis memberikan gambaran umum di sini, analisis yang lebih rinci dan mendalam dapat ditemukannya.

Selanjutnya, dari hasil kasus tersebut juga didukung oleh dua aspek penting:

Aspek Penelitian	Temuan Utama
Aspek 1: Dampak Sistem Peradilan yang Lamban	Penelitian disini mengungkapkan bahwa sistem peradilan yang lamban dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia individu, seperti hak atas persidangan yang adil.
Aspek 2: Penyiksaan dalam Penjara	Penelitian ini menggambarkan bahwa kasus penyiksaan dalam penjara berdampak serius pada hak asasi manusia individu dan menimbulkan keprihatinan dalam hal keamanan publik.

Penjelasan:

Selain kasus-kasus yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini juga mengeksplorasi dua aspek penting lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Aspek pertama menyoroiti dampak sistem peradilan yang lamban terhadap hak asasi manusia individu, terutama hak atas persidangan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berjalan lambat dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi individu dalam konteks peradilan.

Di sisi lain, aspek kedua mengkaji isu penyiksaan dalam penjara dan dampaknya pada hak asasi manusia individu, serta kekhawatiran yang muncul dalam hal keamanan publik. Temuan utama penelitian ini menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang memastikan bahwa tindakan penyiksaan tidak dibiarkan terjadi dan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi. Penjelasan singkat di atas mencerminkan temuan utama yang ditemukan oleh penulis, dan informasi lebih rinci serta analisis mendalam dapat ditemukan dalam pembahasan.

Pembahasan

1. Perbandingan antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana

- Hak Asasi Manusia sebagai Prinsip Dasar: Hak asasi manusia adalah pondasi dari sistem hukum yang demokratis. Mereka mencerminkan prinsip-prinsip universal yang melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain. Hak asasi manusia termasuk hak-hak seperti kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan hak atas persidangan yang adil. Ini adalah prinsip-prinsip yang melekat pada setiap manusia tanpa pandang ras, agama, atau status sosial.
- Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum: Di sisi lain, kepentingan publik adalah hal yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Kepentingan ini mencakup perlindungan terhadap tindakan kriminal, menjaga ketertiban umum, dan melindungi hak-hak masyarakat yang lebih luas. Tanpa penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat terancam oleh perilaku kriminal yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
- Keseimbangan yang Sulit Ditemukan: Konflik sering timbul ketika penegakan hukum harus mencari keseimbangan antara hak asasi manusia individu dan kepentingan publik yang lebih luas. Seringkali, tindakan penegakan hukum yang diambil untuk menjaga kepentingan publik dapat terlihat sebagai pelanggaran hak asasi individu. Ini menciptakan ketegangan yang kompleks dalam sistem hukum, dan menuntut pemahaman yang mendalam tentang batasan dan pengecualian yang dapat diterima dalam menjaga keseimbangan.

Dalam melihat perbandingan ini, kita memahami bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum pidana adalah menemukan cara menjaga keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia dan kepentingan publik. Ini adalah aspek inti yang perlu dipahami dalam konteks konflik antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. (White, 2022).

2. Kasus-kasus hukum pidana kontemporer menggambarkan konflik antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas

Kasus-kasus hukum pidana kontemporer telah menjadi cerminan nyata dari konflik antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan masyarakat. Misalnya, kasus-kasus penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali menimbulkan pertanyaan tentang kelebihan kekuasaan yang dapat mengancam hak individu. Di sisi lain, tindakan hukum terhadap terduga pelaku kejahatan sering dilihat sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat. Ini mengilustrasikan ketegangan yang terus muncul dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana.

Kasus-kasus ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum pidana berinteraksi dengan hak asasi manusia individu. Misalnya, kasus penangkapan yang terkadang diduga melibatkan

penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum menantang prinsip-prinsip hak individu yang dijamin oleh hukum. Namun, upaya penegakan hukum dalam menghadapi pelaku kejahatan juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur. Perbandingan kasus-kasus ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum pidana dapat berdampak pada hak asasi manusia.

Analisis kasus-kasus ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konflik ini terwujud dalam situasi dunia nyata. Setiap kasus menunjukkan dinamika yang unik dan kompleks antara hak individu dan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan memeriksa studi kasus ini secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi pola umum dan perbedaan yang muncul dalam berbagai konteks penegakan hukum pidana kontemporer. Hal ini membantu kita memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. (Turner, 2021).

3. Dampak dari kebijakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat

Dampak kebijakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat adalah aspek yang mengundang perhatian besar. Kebijakan-kebijakan hukum pidana dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Contohnya, ketika pemerintah mengambil tindakan untuk menerapkan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara atau mengawasi komunikasi pribadi dalam upaya untuk mengatasi kejahatan, hal ini dapat berdampak pada hak asasi individu atas privasi dan kebebasan berekspresi. Dalam situasi seperti ini, perlu adanya penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tanpa mengorbankan kepentingan publik yang sah.

Keputusan terkait kebijakan hukum pidana dapat memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketika pemerintah bertindak untuk membatasi hak individu dalam rangka menjaga ketertiban sosial atau melindungi keamanan publik, perlu ada pertimbangan hati-hati terhadap dampak yang mungkin timbul (Sudarsono, 1992). Dalam beberapa kasus, terdapat konflik antara perlindungan hak asasi manusia individu dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang mencerminkan situasi dunia nyata dan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan hukum pidana ini dapat memengaruhi hak asasi manusia dalam masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi yang seksama terhadap kebijakan hukum pidana menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban publik, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Memahami bagaimana kebijakan hukum pidana berdampak pada hak asasi manusia

adalah langkah awal dalam mengatasi konflik yang seringkali muncul dalam domain ini. Sehingga, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana modern. (Garcia, 2019).

Secara keseluruhan penelitian ini, penulis telah menjelajahi perbandingan yang mendalam antara hak asasi manusia individu dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana. Sebagaimana diilustrasikan dalam berbagai kasus hukum pidana kontemporer, dilema kompleks muncul ketika penegakan hukum harus menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketertiban sosial yang diperlukan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah dampak dari kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu di dalam masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum tertentu dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum yang berlebihan atau tindakan brutal oleh aparat penegak hukum dapat mengancam hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan, integritas fisik, dan perlindungan dari penyiksaan.

Selain itu, penelitian ini juga menggali dampak sistem peradilan yang lamban terhadap hak asasi manusia individu, khususnya hak atas persidangan yang adil (Wardhana, 2017). Temuan menunjukkan bahwa ketidakpastian dan keterlambatan dalam proses peradilan dapat menghambat akses individu terhadap keadilan, yang merupakan hak asasi yang sangat penting.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan informasi, penelitian ini juga mengkaji dampak pengawasan pemerintah terhadap internet pada hak asasi manusia individu dan kepentingan publik. Temuan menyoroti perlunya keseimbangan yang baik antara keamanan nasional dan perlindungan kebebasan berbicara dan akses informasi.

Kasus-kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem hukum pidana dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara hak asasi individu dan kepentingan publik. Untuk menjaga ketertiban sosial yang diperlukan oleh masyarakat, penegakan hukum harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana penegakan hukum pidana berdampak pada hak asasi manusia dalam dunia modern yang kompleks. Pemahaman yang lebih mendalam tentang dilema ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih seimbang dan menjaga hak-hak individu tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Dalam akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik antara hak asasi manusia individu dan kepentingan publik dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam

dunia yang terus berubah, penting bagi sistem hukum untuk tetap relevan dan menjaga keseimbangan yang tepat untuk melindungi hak-hak dasar individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Studi ini telah menggambarkan kompleksitas konflik yang ada dalam penegakan hukum pidana, yang mempertemukan hak asasi manusia individu dan kepentingan publik yang lebih luas. Perbandingan antara hak asasi manusia dan kepentingan publik menjadi kunci untuk memahami akar masalah ini. Kasus-kasus hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya ketegangan yang terus muncul dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan perlunya menjaga ketertiban sosial. Dampak dari kebijakan penegakan hukum pidana terhadap hak asasi manusia individu dan masyarakat menjadi penting untuk dievaluasi.

Harmonisasi Kebijakan: Diperlukan upaya untuk mengembangkan kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih seimbang antara perlindungan hak asasi individu dan kepentingan publik. Proses harmonisasi ini harus mempertimbangkan aspek-aspek kunci seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas persidangan yang adil.

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum pidana. Dengan lebih terbuka, masyarakat dapat memahami tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, mekanisme akuntabilitas yang kuat juga harus diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan penegakan hukum pidana.
- 2) **Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan hukum pidana sangat penting. Pendidikan hukum yang lebih luas dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka serta implikasi dari tindakan hukum yang diterapkan.
- 3) **Riset Lanjutan:** Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus menggali konflik-konflik yang ada dalam penegakan hukum pidana dan mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih seimbang, menjaga hak asasi manusia individu, dan mendukung kepentingan publik yang sah.

REFERENSI

- Amelia Arief. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, A. K. (2022). Tinjauan Yuridis

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.
- Melisa Dewi Nur Aeni & Bambang Tri Bawono. (2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*.
- Michael, E. I. (2017). Nigeria's Investment Environment: Issues Of Economic Growth And Development. *Expert Journal Of Finance*, 5(2), 1–11.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Vi). Rineka Cipta.
- Wardhana, D. (2017). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Yulianto Kadji. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Deepublish.